

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan, diungkapkan bahwa pendidikan diarahkan untuk seluruh rakyat dengan perhatian utama yaitu pada rakyat yang dikatakan kurang mampu supaya dapat mengembangkan moral yang lebih baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945 dicermati maka dalam mengikuti pendidikan adalah sebagai hak asasi untuk setiap warga Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan hal tersebut sudah ada sanksi yang diterapkan.

Menurut Radja Mudyaharjo (2002:1) menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu”.

Pendidikan di Indonesia merupakan seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud) yang dulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Pendidikan merupakan elemen penting untuk membangun masyarakat di dalam sebuah negara. Pada Negara Indonesia, belum semua masyarakat mampu mengakses pendidikan yang terjangkau. Padahal, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menyediakan pendidikan yang murah, bahkan gratis yang ada di Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 yaitu bahwa yang berhak untuk diambil oleh setiap warga negara, tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kewajiban negara dalam membiayai pendidikan serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap diri untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang

tanggung dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan pokok kalimat utama yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Pendidikan tidak diselenggarakan secara tidak sengaja atau seenaknya, fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik. Kata “Menyiapkan” diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong ke pencapaian tujuan yang dicita-citakan.

Lingkungan tersebut disusun dan ditata didalam suatu kurikulum, yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran. Untuk bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan yang memenuhi persyaratan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu dengan adanya “pendidikan gratis”. Pendidikan gratis atau juga disebut dengan sekolah gratis adalah sebuah program pemerintah yang diupayakan untuk menyelesaikan masalah pemerataan akses pendidikan. Kebijakan sekolah gratis ini diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah mahalny biaya pendidikan yang banyak

dikeluhkan masyarakat terutama dari golongan menengah ke bawah. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang selama ini ditanggung oleh sekolah dari beberapa sumbangan pendidikan (pungutan liar) dari masyarakat, ini diganti dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah gratis bukan sesuatu yang harus diminta masyarakat karena itu sudah menjadi hak untuk mereka. Pada era Presiden Jokowi sekarang diterapkan program Wajib Belajar 12 tahun tingkat pendidikan SD/SMP/SMA/setara bagi seluruh sekolah baik negeri maupun swasta.

Program Pendidikan Gratis di berbagai daerah di Indonesia, yang telah menerapkan Program Pendidikan Gratis tersebut salah satunya telah diterapkan di Kabupaten Jember. Dimana pada masa jabatan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., sudah menerapkan Program Pendidikan Gratis sejak tahun 2016 hingga sekarang. Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember Pasal 2 Ayat (2) menyatakan secara khusus bahwa Program Pendidikan Gratis bertujuan untuk membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri penerima dana pendidikan gratis terhadap biaya operasional sekolah.

Sasaran program pendidikan gratis dalam Peraturan Bupati Jember No. 65 Tahun 2016 pada Pasal 3 adalah semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kecuali untuk tahun pertama sarasannya adalah sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan kabupaten, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya hanya pada jenjang pendidikan dasar baik di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten maupun di lingkup Kementerian Agama. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) dijelaskan bahwa sekolah wajib membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan untuk SMP/MTs/SMA/SMK sedangkan untuk SD/MI dikirim ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kecamatan.

Program Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai pasal 58 H ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing

menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan.

Bupati Jember mengharapkan program pendidikan gratis ini dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antar masyarakat kaya dan miskin, serta kesenjangan antara wilayah kota dan desa, meningkatkan angka siswa melanjutkan sekolah, dan menekan angka drop out (DO). Pendidikan adalah sebuah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pendidikan di Kabupaten Jember harus digratiskan hingga tingkat SMA/SMK dan tidak boleh memberatkan masyarakat. Bupati bahkan sudah menginstruksikan tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah negeri hingga tingkat SMA. Meskipun pengelolaan lembaga pendidikan pada SMA/SMK saat ini berada di bawah naungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, namun di Kabupaten Jember program pendidikan gratis tetap bisa direalisasikan. Untuk membantu para siswa agar tidak putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan dana bagi siswa yang dapat diajukan sebagai bantuan beasiswa.

Bupati Faida menyatakan hal tersebut sengaja dilakukan sebagai salah satu upaya pengungkit untuk mempercepat kemajuan pendidikan. Terkait dengan sasaran dan besaran dana Program Pendidikan Gratis per siswa, sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah semua Sekolah SD - SMP Negeri yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan mempertimbangan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) ditentukan oleh jumlah peserta didik yang ada di lembaga tersebut. Berdasarkan pengelolaan program PPG, bahwa program PPG disalurkan langsung ke SD / SMP Negeri melalui Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan Bank Jatim. Namun terdapat juga lembaga swasta yang tidak mengajukan alokasi dana Program Pendidikan Gratis (PPG) kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Program Pendidikan Gratis ini sebenarnya telah diberikan kepada semua lembaga negeri maupun swasta, bagi lembaga negeri memang sudah dinyatakan wajib untuk menerima Program Pendidikan Gratis, dan bagi lembaga swasta itu tergantung pada lembaga itu sendiri dapat menerima atau tidaknya. Sesungguhnya program pemerintah ini akan menjadi lebih mudah

terrealisasi jika tanpa adanya pro dan kontra yang terjadi tentunya. Kualitas tidak perlu diragukan, dan guru pun dengan sukacita mengajarkan semua hal yang baru kepada anak didik mereka, karena mengajar merupakan tugas utama dari seorang guru untuk anak didiknya.

Setiap Program yang dibuat tentunya akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu adanya peningkatan mutu pendidikan, sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu dana yang diberikan pemerintah menjadi sia-sia, jika orang tua kurang mendukung memotivasi anaknya untuk bersekolah. Dari sini kita dapat melihat bahwa salah satu dampak positif dari kebijakan pendidikan gratis ini adalah adanya peningkatan mutu pendidikan, meskipun peningkatannya tidak terlalu mencolok untuk sekarang ini. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu Faktor Internal, yang memberikan pengaruh lebih kepada anak didik yaitu pendidik dalam hal ini adalah guru. Meskipun semua fasilitas dalam sekolah itu sudah lengkap, namun jika guru sebagai pengajar tidak memiliki keterampilan dan ilmu yang baik maka kualitas atau mutu pendidikan dilihat dari lulusan peserta didik akan semakin memprihatinkan. Faktor Eksternal, Adalah masyarakat pada umumnya. Dimana, masyarakat merupakan ikon dan merupakan tujuan dari pendidikan, atau kata lain sebagai objek pendidikan.

Jika kita masih mempertanyakan mengapa biaya pendidikan harus gratis, maka sebaiknya kita kembali pada tahun 1945 bahwa ketika kita memproklamkan diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Bagaimana mungkin kita akan dapat mencerdaskan bangsa ini jika untuk mendapatkan pendidikan dasar saja warga negaranya kesulitan karena pendidikan yang dikelola oleh pemerintah mahal harganya. Maka, pendidikan gratis merupakan program untuk meringankan beban orang tua atau wali murid melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan wajib belajar yang bermutu. Program ini juga membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan kajian tentang “Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember”. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana evaluasi pada Program Pendidikan Gratis pada jenjang sekolah di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pelaksanaan program pendidikan gratis, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimana Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang pendidikan khususnya dalam penerapan program pendidikan gratis.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.